

DENGAN KAMTIBMAS YANG KONDUSIF MEMBUAT PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI SEMAKIN LAJU

(Diambil dari Ceramah Kapolri pada Semiloka Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia)

Kawasan timur Indonesia (KTI) menurut klasifikasi Bappenas, terdiri dari propinsi-propinsi di Kalimantan (Barat, Tengah, Timur dan Selatan), Sulawesi (Utara, Tengah, Tenggara, Selatan dan Gorontalo), Maluku (Utara dan Tenggara), Papua dan Nusa Tenggara (Barat dan Timur). Klasifikasi Bappenas ini didasarkan pada kesamaan beberapa karakteristik seperti ekonomi, demografi, sosial dan lainnya di kawasan tersebut. Namun dalam tulisan ini, KTI hanya mencakup propinsi-propinsi di Sulawesi, Maluku dan Papua.

KTI berbatasan langsung dengan negara lain dan lautan bebas. Di barat di samping berbatasan dengan Kalimantan berbatasan pula dengan Malaysia. Di utara berbatasan dengan Filipina. Di timur berbatasan dengan Papua Nugini dan di selatan berbatasan dengan Timor Lorosae dan Australia. Akibatnya tidak tertutup ke-

mungkinan adanya peningkatan gangguan kamtibmas. Khususnya gangguan kriminalitas seperti pencurian ikan dan konflik dengan negara tetangga yang bisa menimbulkan konflik secara internasional.

Luas area pulau Sulawesi sekitar 188.500 km², Maluku 74.500 km² dan Papua 422.000 km² Sementara luas daratan Indonesia sekitar 1.913.300 km² Dengan demikian, luas area ketiga pulau tersebut (KTI) sekitar 685.000 km² atau 35,7 persen dari luas area Indonesia. Di lain pihak, jumlah penduduk KTI hanya sekitar 18,6 juta orang pada tahun 2000 sehingga rata-rata setiap kilometernya dihuni oleh 29 orang Papua. Merupakan daerah yang memiliki area terluas, namun dihuni oleh kurang dari 2,1 juta orang sehingga setiap km² nya hanya dihuni oleh sekitar 5 orang saja. Lihat tabel 1.

TABEL 1. Luas Area, Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk KTI 1990 - 2000

PROPINSI	LUAS (RIBU KM ²)	JML PEND. (JUTA ORANG)		TKT. KEPDTAN (ORANG/KM ²)		LAJU PERTUMB. PENDUDUK (%)	
		1990	2000	1990	2000	80-90	90-00
Sulut	19,0	2,5	2,8	130	164	1,6	1,3
Sulteng	69,0	1,7	2,1	25	30	2,9	1,9
Sulsel	72,8	7,0	7,8	90	107	1,4	1,1
Sultra	27,7	1,3	1,8	49	64	3,7	2,8
Maluku	74,5	1,9	2,0	25	27	2,8	0,6
Papua	422,0	1,6	2,1	4	5	3,5	2,5
KTI	685,0	16,0	18,6	23	27	2,2	1,5
Indonesia	1.919,3	178,6	203,5	93	106	2,0	1,3

Sumber : Badan Pusat Statistik, berbagai publikasi.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tingkat kepadatan penduduk KTI jauh lebih rendah dari angka nasional, khususnya KBI, artinya jumlah penduduk KTI masih sedikit namun areanya masih luas. Di lain pihak, tingkat pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dari KBI. Terlihat pula bahwa Sultra dan Papua memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang rata-rata mencapai 3% per tahun sementara propinsi lainnya kurang dari 2% pada tahun 1990-2000, bahkan Maluku hanya 0,6% (tadinya 2,8% pada tahun 1980-1990). Tingginya laju pertumbuhan di Sultra dan Papua (juga Maluku pada tahun 1980-1990) karena daerah-daerah ini merupakan daerah tujuan transmigrasi asal Jawa dan Bali. Selain itu daerah ini merupakan daerah frontier (daerah masa depan) karena banyak pekerja yang berasal dari luar propinsi tersebut yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan guna mengeksploitasi sumber daya alamnya yang melimpah. Namun setelah dilanda krisis, daerah-daerah ini sudah tidak menarik lagi yang ditunjukkan oleh lesunya pembangunan ekonomi daerahnya.

Akibatnya, tidak sedikit pendatang yang terpaksa kembali ke daerah asalnya dan banyak pengungsi di daerah ini yang juga disebabkan oleh konflik yang terjadi dengan penduduk setempat.

Dalam pembangunan daerahnya secara umum, KTI tertinggal jauh di hampir semua pembangunan ekonominya dibandingkan dengan KBI, padahal KTI kaya akan sumber daya alamnya. Akibatnya pembangunan KTI perlu dipercepat, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal. Namun dengan adanya krisis upaya-upaya percepatan pembangunan KTI ini terbengkalai kembali. Masalahnya situasi dan kondisi KTI dewasa ini sudah tidak menarik lagi akibat faktor politik, ekonomi dan sosial lainnya terutama keamanan dan ketertiban umum yang kurang stabil, serta hukum yang belum tertib, akan tetapi dengan upaya yang tiada henti dalam mewujudkan stabilitas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, maka percepatan pembangunan KTI bisa terlaksana dengan baik.

TABEL 2, Perkembangan PDRB / Kapita (Atas Dasar Harga Konstan) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi KTI, 1990-2000

PROPINSI	PDRB / Kapita (Rp. juta)				Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
Sulut	1,4	1,3	1,4	1,5	5,4	-2,4	5,8	6,2
Sulteng	1,2	1,1	1,1	1,2	4,7	-4,0	2,8	4,2
Sulsel	1,3	1,2	1,2	1,3	4,3	-5,3	2,8	4,9
Sultra	1,0	0,9	0,9	0,9	5,3	-5,8	2,5	5,3
Maluku	1,6	1,5	1,1	1,0	3,5	-5,9	-24,3	-5,5
Papua	3,9	4,2	4,0	4,0	7,4	12,7	-3,5	3,2
KTI	1,4	1,3	1,3	1,4	4,5	-5,1	2,8	4,7
Indonesia	2,2	1,9	1,9	2,0	4,7	-13,2	0,9	4,8

Catatan : PDRB = Pendapatan Regional Domestik Bruto

Sumber : Idem Tabel 1.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita KTI lebih rendah dari angka nasional, khususnya KBI. Di lain pihak laju pertumbuhan ekonomi KTI relatif stabil dibandingkan KBI. Hal ini ditunjukkan saat terjadinya krisis dimana laju pertumbuhan nasional mengalami penurunan 13,2 persen tetapi KTI hanya turun 5,4 persen, bahkan Papua mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu 12,7 persen terlihat pula bahwa Maluku mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang turun sejak tahun 1998 dan turun secara signifikan pada tahun 1999. Begitu pula, pendapatan per kapitanya turun cukup berarti pada tahun 1999 dan 2000. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita ini erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat Maluku yang turun. Hal ini erat hubungannya dengan faktor keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku yang tidak kondusif.

Dengan demikian, peran Polri menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena Polri adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, Polri harus mampu menjaga kamtibmas dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif guna mendukung percepatan pembangunan KTI. Sejarah mencatat bahwa stabilitas di bidang keamanan dan ketertiban umum telah berhasil dalam mendukung laju pembangunan ekonomi di masa order baru, meskipun telah berdampak negatif terhadap supremasi hukum dan HAM dan sejarah mencatat pula bahwa Polri telah berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimana Polri sekarang kembali ke fungsi yang sesungguhnya yaitu sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dalam penegakan hukum secara profesional. Hal

ini berbeda dengan Polri di masa silam dimana Polri pernah menjadi alat penjajah di jaman Belanda, kemudian menjadi alat penguasa di jaman orde baru.

Oleh sebab itu, pembahasan mengenai Polri di tengah-tengah era reformasi, globalisasi, otonomi daerah dan di era krisis sekarang sangat penting untuk diketahui, namun sebelum membahasnya lebih jauh, perlu diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi Polri dewasa ini.

Permasalahan

Berdasarkan kenyataan di atas, maka masalah yang dihadapi Polri yang relevan dengan tema seminar ini adalah :

1. Bagaimana upaya Polri dalam menegakkan kamtibmas sesuai dengan fungsinya sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dalam penegakan hukum yang profesional guna mempercepat pembangunan KTI ?
2. Bagaimana upaya Polri dalam melaksanakan tugas, dan memberikan informasi tentang tugas dan fungsinya itu kepada masyarakat, khususnya kepada media masa di KTI ?

Tugas dan Fungsi Polri

Dalam hubungan ini, tugas dan fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum, pengayom, pelindung, pelayan demi tegaknya supremasi hukum dan HAM perlu diketahui terlebih dahulu.

1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri di atas maka diperlukan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini, maka acuannya adalah UU No. 8 tahun 1981, UU No. 20 tahun 1982 dengan penyempurnaannya UU No. 1 tahun 1998, dan UU No. 28

tahun 1997 serta UU No. 2 tahun 2002 tentang UU Kepolisian yang baru saja disahkan. Seluruh UU ini dengan jelas menyatakan bahwa Polri sebagai alat penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat guna tercapainya tertib dan tegaknya hukum. Namun sukses tidaknya pelaksanaan tugas ini akan sangat tergantung dari aspek kuantitas dan kualitas sehingga visi dan misi Polri harus tetap diarahkan untuk mewujudkan kemampuan Polri yang profesional, efektif, efisien dan modern agar mampu mengemban tugas dan fungsinya.

2. Dengan demikian, tugas yang dihadapi Polri sangat kompleks, mulai dari tindak kriminal sederhana seperti tawuran pelajar hingga tindakan yang bertaraf internasional seperti jaringan narkoba. Namun masalah yang jauh lebih penting yang dihadapi Polri dewasa ini adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kenyataan ini sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi Polri sehingga menjadi kewajiban Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif sekarang ini.

3. Dewasa ini, faktor keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wajah suram bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Pasalnya, IMF dan Bank Dunia sampai harus menyertakan pentingnya faktor keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjamin para investor, khususnya investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia melalui Letter of Intent (LOI). Masalahnya faktor kamtibmas yang kondusif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik untuk negara maju maupun negara berkembang.

4. Faktor kepastian hukum, keamanan dan ketertiban umum merupakan sarana penting untuk integritas bangsa misalnya masih ditemui adanya keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memisahkan diri yang lepas dari NKRI. Begitu pula di Poso, Ambon yang masih potensial untuk berkonflik kemudian daerah-daerah lainnya yang juga berpotensi untuk konflik. Semuanya ini menghadapkan Polri ke situasi yang sulit untuk mengatasinya. Namun hal ini merupakan tugas Polri untuk menyelesaikan secara profesional sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Polri diatas, maka Polri harus dapat menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih ada gangguan kamtibmas yang cukup meresahkan masyarakat. Untuk itu Polri sebagai inti kekuatan dan penanggung jawab di bidang kamtibmas bersama dengan aparat terkait dalam Criminal Justice System (CJS) dituntut untuk dapat dan mampu mengambil langkah-langkah antisipatif yang antara lain adalah peningkatan SDM Polri dalam upaya untuk memelihara kamtibmas dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mempercepat laju pembangunan ekonomi KTI.

Dalam kaitan ini, upaya-upaya Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum tertumpu pada kekuatan kewilayahan Polri dengan back up satuan fungsional secara berjenjang dari tingkat mabas Polri hingga lini terdepan yang penekanannya pada :

1. Tugas yang bersifat pre-emptif dan preventif diarahkan pada sasaran yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan program pemerintah daerah masing-masing.

Selain itu diarahkan kepada upaya peningkatan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mengamankan diri dan lingkungannya (Community policing).

2. Melakukan upaya pembinaan hubungan kemitraan yang berbasiskan masyarakat dengan berbagai potensi kelembagaan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat.

3. Penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat mengedepankan konsep kewilayahan yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu mengutamakan penanganan lintas sektoral secara terpadu melalui pemberdayaan peraturan daerah dengan tetap berpedoman pada UU yang berlaku.

4. Memberikan pelayanan kepada pengunjung rasa yang dilakukan secara demokratis dan tertib dengan mengutamakan tindakan persuasif. Sementara terhadap pengunjung rasa yang bersifat anarkis melalui upaya pencegahan. Namun bila perlu ditangani secara tegas dan terukur sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Meningkatkan kemampuan inteleejen keamanan Polri dalam menggunakan sumber-sumber dan jaringan informasi mulai dari yang bersifat tradisional hingga teknologi canggih dan berupaya menghindari tindakan represif.

6. Penanganan daerah-daerah rawan konflik dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Hal ini dilakukan demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

7. Memberi atensi khusus terhadap kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup, hasil hutan dan kekayaan alam lainnya serta narkoba.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan aparat penegak hukum, maka upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam memelihara kamtibmas yang kondusif untuk mempercepat pembangunan KTI adalah :

1. Untuk mendukung percepatan pembangunan KTI, maka political will dan political do pemerintah sangat diperlukan. Undangan ke para investor, baik asing maupun domestik, untuk menanamkan modalnya di KTI harus disertai insentif yang memadai mengingat kondisi KTI masih jauh dibandingkan KBI. Semuanya ini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh kepastian hukum keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, terpeliharanya kamtibmas dan penciptaan iklim usaha yang kondusif sangat mendukung percepatan pembangunan KTI.

2. Polri bertindak preventif dan persuasif terhadap mereka yang menyampaikan aspirasinya secara tertib. Namun bertindak tegas dan keras, jika penyampaiannya itu dilakukan secara anarkis. Hal ini dilakukan dalam upaya penegakkan supremasi hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kasus Papua, Polri berupaya meyakinkan masyarakat daerah ini bahwa mereka adalah bagian dari bangsa dan wilayah Indonesia.

3. Polri selalu mengusahakan dialog dengan masyarakat yang sedang bertikai dan bertindak persuasif kepada mereka yang

terlibat konflik. Namun Polri bertindak tegas jika dilakukan secara anarkis. Dalam menghadapi konflik di Poso misalnya Polri mendukung upaya pemerintah (yang dikoordinir Menko Kesra), yang bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan dialog secara kekeluargaan sehingga hasilnya bisa diterima semua pihak. Pola dialog ini akan dilakukan pula dalam menyelesaikan konflik Ambon. Upaya yang dilakukan Polri di daerah rawan konflik antara lain menjaga perbatasan antar propinsi, kabupaten atau pulau agar konflik tidak menyebar ke daerah-daerah lainnya.

4. Dengan demikian, Polri berada di garis paling depan dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugasnya sebagai Bhayangkara Negara. Dengan demikian Polri di era reformasi bersifat dinamis dan terbuka sehingga masyarakat, pemerintah, wakil rakyat dan pihak pers bisa menilai kinerja Polri. Jadi dalam hal ini Polri siap dikritik. Namun komentar, pendapat dan kritikan yang diberitakan di media massa, media kaca dan media lainnya perlu diberikan secara proporsional, mendalam, hati-hati, perlu cek dan ricek dan ada solusinya. Masalahnya, masyarakat kita umumnya masih berpendidikan rendah, tinggal di pedesaan dan masih berpikiran tradisional, sehingga berita yang isinya kurang bisa dipertanggung jawabkan bisa menyulut opini publik yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

